



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ki Mangunsarkoro 43 A, Pakualaman, Yogyakarta 55111
Telepon (0274) 512285; Faksimile (0274) 520575
Laman yogyakartakota.kemenag.go.id

Nomor : 1412/Kk.12.05/1/KU.01.1/07/2026
Lampiran : Satu bendel
Hal : Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Satker 417611

20 Juli 2026

Yth. Kepala KPPN Yogyakarta
u.p. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Kementerian Agama Kota Yogyakarta meliputi LRA, LO, LPE, Neraca dan CALK Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta satuan kerja 417611 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebagai informasi, kami terus berkomitmen mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan menolak segala bentuk gratifikasi dan tidak melakukan pungutan liar (pungli).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami menyampaikan terima kasih

Kuasa Pengguna Anggaran
Kementerian Agama Kota Yogyakarta,



Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008

Kami siap melayani dengan **SMART** : SENYUM | MUDAH | AMANAH | RAMAH | TRANSPARAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : Bc29qTyl

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA (417611)**

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN 2026
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026**



Jl. Ki Mangun Sarkoro 43 A, Pakualaman
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 417611 adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 417611. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Ka kan Kemenag Kota Yogyakarta

H. Ahmad Shidqi, S.Psi, M.Eng

197911302009011008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	4
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	6
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	38
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 417611 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Ka kan Kemenag Kota Yogyakarta

H. Ahmad Shidqi, S.Psi, M.Eng

NIP. 197911302009011008

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 417611 Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp371.388.635 atau mencapai 50,02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp742.536.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.767.895.076 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp152.272.975; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp20.613.247.101 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.375.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp284.700.000 dan Rp20.498.195.076

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp586.693.987 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-586.693.987, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-586.693.987.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar Rp20.749.500.428, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-586.693.987 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 335.388.635 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp20.498.195.076

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

U R A I A N	Catatan	TA 2026		% thd Angg	TA 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	706.536.000	335.388.635	47,47	473.649.292
Belanja Modal	B.2.3	36.000.000	36.000.000	100,00	125.615.500
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		742.536.000	371.388.635	50,02	599.264.792

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kakan Kemenag Kota Yogyakarta

H. Ahmad Shidqi, S.Psi, M.Eng
197911302009011008

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

U R A I A N	Catatan	2026	2025
ASET			
ASET LANCAR			
	C.1	-	-
	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	143.500.000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	8.772.975	3.707.850
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		152.272.975	3.707.850
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	15.289.278.000	15.289.278.000
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	2.386.392.899	2.350.392.899
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	5.064.124.776	5.064.124.776
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	103.727.000	103.727.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	309.796.500	309.796.500
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(2.540.072.074)	(2.376.339.097)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		20.613.247.101	20.740.980.078
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	19.500.000	19.500.000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	10.650.000	10.650.000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(27.775.000)	(25.337.500)
Jumlah Aset Lainnya		2.375.000	4.812.500
JUMLAH ASET		20.767.895.076	20.749.500.428
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	1.200.000	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	125.000.000	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	143.500.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.49	15.000.000	-
	C.50	-	-

Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		284.700.000	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		284.700.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	20.498.195.076	20.887.880.518
JUMLAH EKUTAS		20.498.195.076	20.887.880.518
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.782.895.076	20.887.880.518

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	5.807.875	3.707.850
Beban Barang dan Jasa	D.5	366.744.635	310.580.792
Beban Pemeliharaan	D.6	33.621.000	16.688.000
Beban Perjalanan Dinas	D.7	14.350.000	12.120.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	166.170.477	211.004.907
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		586.693.987	554.101.549
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(586.693.987)	(554.101.549)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(586.693.987)	(554.101.549)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(586.693.987)	(554.101.549)

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Ka kan Kemenag Kota Yogyakarta

H. Ahmad Shidqi, S.Psi, M.Eng
197911302009011008

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	20.749.500.428	20.968.332.775
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(586.693.987)	(554.101.549)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	335.388.635	473.649.292
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(251.305.352)	(80.452.257)
EKUITAS AKHIR	E.6	20.498.195.076	20.887.880.518

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kakan Kemenag Kota Yogyakarta

H. Ahmad Shidqi, S.Psi, M.Eng
197911302009011008

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

SEJARAH SINGKAT

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Sejak zaman Belanda, jauh sebelum berdirinya Departemen Agama, urusan agama khususnya pengurusan Agama Islam baik pada zaman pemerintahan kesultanan di Jawa maupun pemerintahan kesultanan di luar Jawa, diatur sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku pada masa itu di bawah pemerintahan Kota Yogyakarta, telah melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang pada dasarnya memberikan keleluasaan umat beragama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing, khususnya pelayanan pernikahan dan perceraian. Tugas-tugas pelayanan pernikahan dan perceraian pertama kali dijabat oleh Penghulu Lurah Naib. Seterusnya Penghulu Lurah Naib ini merupakan cikal bakal berdirinya Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama.

Dalam perkembangannya Penghulu Lurah Naib berubah nama menjadi Kementerian Agama, dimana tugas pokok dan fungsinya tidak sekadar melayani pernikahan dan perceraian namun juga pelayanan Imam dan Khotib, yang dalam perkembangannya menjadi Penerangan Agama Islam.

Pada tanggal 24-26 November 1945 diadakan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jakarta yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan utusan Komite Nasional Indonesia dari seluruh Indonesia. Dalam sidang tersebut wakil Komite Nasional Indonesia dari daerah Banyumas yang terdiri dari KH. Abu Dardiri, KH. Saleh Su'adi dan M. Sukoso Wiryo Saputro mengusulkan supaya dalam Negara yang sudah merdeka urusan agama jangan ditempatkan pada kementerian lainnya, melainkan diurus sendiri oleh kementerian yang khusus mengatur masalah-masalah agama.

Usulan tersebut mendapat sambutan yang baik dari anggota sidang lainnya, sehingga pada tanggal 3 Januari 1946 diumumkan berdirinya Kementerian Agama sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Nomor: 1/SD/1946 di Yogyakarta, Menteri Agama pertama saat itu adalah KH. Rosyidi, B.A.

Berdasar KMA Nomor 9 tahun 1952 dengan menggunakan Holding Company (organisasi yang masing-masing berdiri sendiri di daerah) yang dikenal dengan nomenklatur Jawatan (Urusan Agama, Pendidikan Agama, dan Penerangan Agama dan Biro Peradilan Agama). Kepala Kantor Jawatan Agama Kota Yogyakarta dijabat oleh Drs. Djunaidi (1980 s.d. 1985),

Perkembangan berikutnya Kantor Jawatan Agama, berubah menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Sebagai Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kota Yogyakarta dijabat Drs. Djunaidi (1980 s.d. 1985).

Berdasarkan KMA Nomor 53 tahun 1971 organisasi instansi vertikal Departemen Agama menjalankan perubahan nomenklatur dari perwakilan menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama untuk tingkat Provinsi dan Kantor Departemen Agama untuk tingkat Kabupaten/Kota.

VISI

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA mempunyai tugas dan fungsi mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang saleh, moderat, cerdas dan unggul dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berdasarkan gotong royong

Untuk mewujudkan tujuan di atas KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA berkomitmen dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

MISI

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

- 1 Meningkatkan kesalehan umat beragama;
- 2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
- 4 Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5 Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
- 6 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

<i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan periode 30 Juni 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 417611. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.
<i>Basis Akuntansi</i>	A.3 BASIS AKUNTANSI Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
<i>Dasar Pengukuran</i>	A.4. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 417611. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
<i>Pendapatan-LRA</i>	(1) Pendapatan- LRA - Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). - Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). - Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<i>Pendapatan-LO</i>	(2) Pendapatan- LO - Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan. b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. - Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2026	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	706.536.000	706.536.000
Belanja Modal	36.000.000	36.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	742.536.000	742.536.000

Realisasi Pendapatan
Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 417611 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Pendapatan ini dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2026		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2026 sebesar 0,00 dari TA 2025 n/a. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp0

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2026 sebesar 0,00 dari TA 2025 PNBP dari pendaftaran pernikahan di triwulan III tahun 2023 meningkat di banding tahun sebelumnya. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	-	-	-
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan mesin	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Belanja
Rp371.388.635

B.2 Belanja

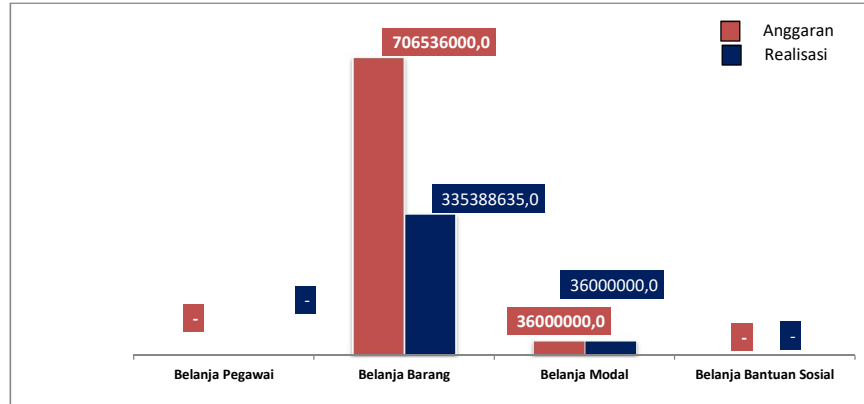
Realisasi Belanja pada TA 2026 adalah sebesar Rp371.388.635 atau 50,02 % dari anggaran belanja sebesar Rp.742.536.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2026

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	706.536.000	335.388.635	47,47
Belanja Modal	36.000.000	36.000.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	742.536.000	371.388.635	50,02

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2026



Dibandingkan dengan TA 2025, Realisasi Belanja TA 2026 mengalami penurunan sebesar 38,03% Realisasi Belanja T.A 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023, dikarenakan belanja 51 (belanja pegawai) di tahun 2024 mengalami penurunan diakibatkan penyuluh honorer yang beralih ke PPPK dan Belanja 52 yang mengalami kenaikan Pagu Anggaran. Berikut rincian realisasi belanja TA 2026 dan TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	335.388.635	473.649.292	(29,19)
Belanja Modal	36.000.000	125.615.500	(71,34)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	371.388.635	599.264.792	(38,03)

Realisasi Belanja
Pegawai Rp0

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2026 sebesar 0,00 % dari TA 2025. Hal ini disebabkan di T.A 2023 belanja pegawai sudah dijadikan satu/dialihkan ke satker Sekretariat Jenderal, hanya ada belanja tunjangan penyuluh non PNS

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Profesi Guru	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Barang
Rp335.388.635

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp335.388.635 dan Rp473.649.292. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2026 mengalami penurunan sebesar 29,19% dari Realisasi TA 2025.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional	299.388.635	348.033.792	(13,98)
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Jasa	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	-
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Banda	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	335.388.635	473.649.292	(29,19)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	335.388.635	473.649.292	(29,19)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2026

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2026	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Modal Rp36.000.000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp36.000.000 dan Rp125.615.500. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2026 mengalami penurunan sebesar 71,34% dibandingkan TA 2025 disebabkan oleh tidak ada anggaran belanja modal di T.A 2023.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000	125.615.500	(71,34)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	36.000.000	125.615.500	(71,34)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	36.000.000	125.615.500	(71,34)

Realisasi Belanja
Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2026 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2025. Hal ini disebabkan oleh n/a.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan
Mesin Rp36.000.000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

#REF!

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000	#REF!	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	36.000.000	#REF!	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	36.000.000	#REF!	-

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2026 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2025. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari n/a.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Modal, Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2025. Hal ini disebabkan n/a.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2025. Hal ini disebabkan n/a.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2026 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2025. Belanja Bantuan Sosial n/a.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Rp0

C.1

Saldo per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian adalah sebagai berikut:

Rincian Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
UP	63.000.000	-
Jumlah	63.000.000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

sisa UP

Rp0

C.2

Saldo per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

n/a

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp143.500.000

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp143.500.000 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

n/a

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

n/a

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

n/a

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

n/a

Piutang Perpajakan
Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Perpajakan
Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2026

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Jenis	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Jenis	TAHUN 2026	TAHUN 2025
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp8.772.975

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp8.772.975 dan Rp3.707.850. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Jenis	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
Barang Konsumsi	8.772.975	3.707.850
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	8.772.975	3.707.850

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi barang persediaan terdata

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 30 Juni 2026. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang
Belum Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Debitur	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2026 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Debitur	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka
Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 30 Juni 2026 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-Piutang
Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2026 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 30 Juni 2026 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

U R A I A N	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
	-	-
Jumlah	-	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp15.289.278.000 dan Rp15.289.278.000. Nilai Tanah tersebut n/a. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	15.289.278.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	15.289.278.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2026

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	909 M2	Jl Mendungwarih No 149 A	3.544.009.000
2	447 M2	Jl Mendungwarih No 149 A	1.702.847.000
3	589 M2	Jl Mendungwarih No 149 A	2.243.796.000
4	945 M2	Jl Mendungwarih No 149 A	3.684.366.000
5	296 M2	Jl Mendungwarih No 149 A	1.127.612.000
6	784 M2	Jl Mendungwarih No 149 A	2.986.648.000
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
Jumlah			15.289.278.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

semua dikuasai kementerian agama

Tanah Belum
Diregister Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp2.386.392.899

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp2.386.392.899 dan Rp2.350.392.899. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	2.350.392.899
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	2.350.392.899
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(1.889.277.768)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	461.115.131

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

-
-
-
-
-
-
-
-

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan
Bangunan
Rp5.064.124.776

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp5.064.124.776 dan Rp5.064.124.776. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	5.064.124.776
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	5.064.124.776
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(548.602.112)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	4.515.522.664

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- n/a

-

-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- n/a

-

-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan Belum
Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp103.727.000

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp.103.727.000 dan Rp.103.727.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	103.727.000
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	103.727.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(102.192.194)
Nilai Buku per	1.534.806

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- n/a
-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- n/a
-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Belum
Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp309.796.500

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp.309.796.500 dan Rp.309.796.500. Aset tetap tersebut n/a. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	309.796.500
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	309.796.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	-
Nilai Buku per 30 Juni 2026	309.796.500

Mutasi tambah/kurang:

n/a

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang
Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. n/a Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp2.540.072.074 dan Rp2.376.339.097. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2026

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.386.392.899	(1.889.277.768)	497.115.131
2	Gedung dan Bangunan	5.064.124.776	(548.602.112)	4.515.522.664
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.727.000	(102.192.194)	1.534.806
4	Aset Tetap Lainnya	309.796.500	-	309.796.500
Akumulasi Penyusutan		7.864.041.175	(2.540.072.074)	5.323.969.101

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

U R A I A N	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada n/a. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2026

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud
Rp19.500.000

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp19.500.000 dan Rp19.500.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 417611 berupa n/a.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2026	19.500.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 30 Juni 2026	19.500.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2026	(17.125.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	2.375.000

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- n/a
- n/a
- n/a
- n/a
- n/a

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. n/a. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2026	T.A. 2025
Dana Lainnya	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

n/a

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2026	T.A. 2025
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

n/a

Aset Lain-lain
Rp10.650.000

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp10.650.000 dan Rp10.650.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2026	10.650.000
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	10.650.000
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2026	(10.650.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 27.775.000

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp27.775.000 dan Rp25.337.500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	19.500.000	(17.125.000)	2.375.000
Aset Lain-lain	10.650.000	(10.650.000)	-
-	-	-	-
Total	30.150.000	(27.775.000)	2.375.000

Utang kepada Pihak Ketiga Rp1.200.000

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp1.200.000 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	1.200.000	-
Total	284.700.000	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp125.000.000

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp125.000.000 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	125.000.000	-
Total	125.000.000	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

pembayaran jaspro penghulu yang belum dibayarkan menunggu MP berikutnya

Hibah Yang Belum Disahkan Rp143.500.000

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp143.500.000 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

n/a

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

n/a

Uang Muka dari KPPN
Rp15.000.000

C.49 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp15.000.000 dan Rp0. Rincian Uang Muka dari KPPN sebagai berikut :

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2025
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

n/a

Rp0

C.50

Saldo per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	15.000.000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	15.000.000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

kas bendahara pengeluaran yang masih dibawa

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

n/a

Kewajiban Konsesi
Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

n/a

Ekuitas
Rp20.498.195.076

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp20.498.195.076. dan Rp20.887.880.518. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

Pendapatan
Perpajakan Rp0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh n/a. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	2026	2025	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Rp0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh berasal dari pendaftaran nikah calon pengantin. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	2026	2025	%
Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Pegawai Rp0

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2026 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan oleh penurunan belanja pegawai karena ada penggabungan belanja pegawai 51 ke satker Sekretariat Jenderal T.A 2023 dan hanya ada beban tunjangan tenaga penyuluh non PNS. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
Rp5.807.875

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp5.807.875 dan Rp3.707.850

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 56,64 persen dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Persediaan konsumsi	5.807.875	3.707.850	56,64
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	5.807.875,00	3.707.850	56,64

Beban Barang dan
Jasa Rp366.744.635

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp366.744.635 dan Rp310.580.792.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 18,08 persen dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan oleh di triwulan III T.A 2023 mengalami penurunan dikarenakan belanja bahan belum maksimal.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Keperluan Perkantoran	91.640.900	107.209.500	(14,52)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	14.100.000	17.180.000	(17,93)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Bahan	67.573.000	91.065.500	(25,80)
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	-	-	-
Beban Langganan Listrik	13.584.143	11.713.535	15,97
Beban Langganan Telepon	5.846.592	5.848.257	(0,03)
Beban Langganan Air	-	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Jasa Profesi	1.000.000	9.800.000	(89,80)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Jumlah	366.744.635	310.580.792,00	18,08

Beban Pemeliharaan
Rp33.621.000

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp33.621.000 dan Rp16.688.000.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 101,47 persen dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan oleh penurunan beban pemeliharaan di triwulan III T.A 2023 karena mengikuti RPD bulanan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.331.000	16.688.000	(8,13)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	290.000	-	-
	-	-	-
Jumlah	33.621.000	16.688.000	101,47

Beban Perjalanan
Dinas Rp14.350.000

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp14.350.000 dan Rp12.120.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 18,40 persen disebabkan oleh terdapat penurunan beban perjalanan dinas di T.A 2023 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2026 dan 2025 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Perjalanan Biasa	14.350.000	11.620.000	23,49
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	500.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	14.350.000,00	12.120.000	18,40

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan olehn/a. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2026 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp166.170.477

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp166.170.477 dan Rp211.004.907.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	108.019.203	152.853.633	(29,33)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.585.875	55.585.875	-
Beban Penyusutan Irigasi	127.899	127.899	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	163.732.977	208.567.407	(21,50)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	163.732.977	208.567.407	(21,50)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	-	-
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

n/a

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

ditahun 2023 sudah tidak ada beban penanganan pandemi covid-19

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.20.749.500.428,00*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.20.749.500.428,00 dan Rp.20.968.332.775,00

*Defisit LO
Rp.586.693.987,00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.586.693.987,00 dan Rp.554.101.549,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. n/a

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari n/a

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2026

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini n/a

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2026

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah n/a. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2026

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp335.388.635

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.335.388.635 dan Rp.473.649.292. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2026

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	335.388.635
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	335.388.635

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DKEL sebesar Rp 335.388.635, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 0

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2026

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Barang Konsumsi	Kanwil Kemenag DIY (417596)	5.087.780
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		5.087.780

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2026

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2026 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp20.498.195.076*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.20.498.195.076,00 dan Rp.20.887.880.518,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan lainnya di laporan triwulan III tahun 2023

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I
LAMPIRAN	II
LAMPIRAN	III
LAMPIRAN	IV
LAMPIRAN	V

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA 417611

Tgl Data : 21/07/26 9:43 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 10:25 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	742,536,000	335,388,635	(407,147,365)	45	808,640,000	473,649,292	334,990,708	59
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	706,536,000	299,388,635	(407,147,365)	42	662,640,000	348,033,792	314,606,208	53
3. Belanja Modal	36,000,000	36,000,000	0	100	146,000,000	125,615,500	20,384,500	86
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA 417611

Tgl Data : 21/07/26 9:43 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 10:25 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	742,536,000	335,388,635	(407,147,365)	45	808,640,000	473,649,292	334,990,708	59
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD SHIDQI, S.Psi, M.Eng
NIP 197911302009011008

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417611) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 21/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 10:26 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0	15,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	143,500,000	0	143,500,000	0.00
Persediaan	8,772,975	3,707,850	5,065,125	136.61
JUMLAH ASET LANCAR	167,272,975	3,707,850	163,565,125	4,411.32
ASET TETAP				
Tanah	15,289,278,000	15,289,278,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,386,392,899	2,350,392,899	36,000,000	1.53
Gedung dan Bangunan	5,064,124,776	5,064,124,776	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	103,727,000	103,727,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	309,796,500	309,796,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,540,072,074)	(2,376,339,097)	(163,732,977)	6.89
JUMLAH ASET TETAP	20,613,247,101	20,740,980,078	(127,732,977)	(0.62)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	19,500,000	19,500,000	0	0.00
Aset Lain-lain	10,650,000	10,650,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(27,775,000)	(25,337,500)	(2,437,500)	9.62
JUMLAH ASET LAINNYA	2,375,000	4,812,500	(2,437,500)	(50.65)
JUMLAH ASET	20,782,895,076	20,749,500,428	33,394,648	0.16
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,200,000	0	1,200,000	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	125,000,000	0	125,000,000	0.00
Hibah Yang Belum Disahkan	143,500,000	0	143,500,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	15,000,000	0	15,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	284,700,000	0	284,700,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	284,700,000	0	284,700,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	20,498,195,076	20,749,500,428	(251,305,352)	(1.21)
JUMLAH EKUITAS	20,498,195,076	20,749,500,428	(251,305,352)	(1.21)
JUMLAH EKUITAS	20,498,195,076	20,749,500,428	(251,305,352)	(1.21)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20,782,895,076	20,749,500,428	33,394,648	0.16

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417611) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 10:26 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD SHIDQI, S.Psi, M.Eng

NIP 197911302009011008

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (417611) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/26 9:43 AM
 Tgl Cetak : 21/07/26 10:25 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	5,807,875	8,830,300	(3,022,425)	(34.228)
Beban Barang dan Jasa	366,744,635	310,580,792	56,163,843	18.083
Beban Pemeliharaan	33,621,000	16,688,000	16,933,000	101.468
Beban Perjalanan Dinas	14,350,000	12,120,000	2,230,000	18.399
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

ESELON I : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417611) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 21/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 10:25 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	166,170,477	211,004,907	(44,834,430)	(21.248)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	586,693,987	559,223,999	27,469,988	4.912
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(586,693,987)	(559,223,999)	(27,469,988)	4.912
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(586,693,987)	(559,223,999)	(27,469,988)	4.912
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(586,693,987)	(559,223,999)	(27,469,988)	4.912

Keterangan :
FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD SHIDQI, S.Psi, M.Eng
NIP 197911302009011008

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417611) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 10:25 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20,749,500,428	20,968,332,775	(218,832,347)	(1.04)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(586,693,987)	(559,223,999)	(27,469,988)	4.91
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	335,388,635	473,649,292	(138,260,657)	(29.19)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(251,305,352)	(85,574,707)	(165,730,645)	193.67
EKUITAS AKHIR	20,498,195,076	20,882,758,068	(384,562,992)	(1.84)

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD SHIDQI, S.Psi, M.Eng

NIP 197911302009011008

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417611) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 21/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 10:26 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	143,500,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	8,772,975	0
0.0	131111	Tanah	15,289,278,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,386,392,899	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,064,124,776	0
0.0	134112	Irigasi	3,837,000	0
0.0	134113	Jaringan	99,890,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	309,796,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,889,277,768
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	548,602,112
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,302,194
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	99,890,000
0.0	162151	Software	19,500,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	10,650,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	10,650,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	17,125,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,200,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	125,000,000
0.0	218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	0	143,500,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	15,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	335,388,635
0.0	391111	Ekuitas	0	20,749,500,428
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	91,640,900	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	14,100,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	67,573,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	125,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	13,584,143	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,846,592	0
3.0	522141	Beban Sewa	48,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,331,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14,350,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	108,019,203	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55,585,875	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	127,899	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	2,437,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417611) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 21/07/26 9:43 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 10:26 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,807,875	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	290,000	0
JUMLAH			23,937,436,137	23,937,436,137

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD SHIDQI, S.Psi, M.Eng

NIP 197911302009011008

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417611) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 10:26 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	335,388,635
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	90,440,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	14,100,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	67,573,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,163,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	13,584,143	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,846,592	0
3.0	522141	Belanja Sewa	48,000,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,000,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,331,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,350,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,000,000	0
JUMLAH			335,388,635	335,388,635

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD SHIDQI, S.Psi, M.Eng

197911302009011008



MONITORING CAPAIAN KINERJA

NO	TAHUN ANGGARAN	KODE BA	NAMA KEMENTERIAN	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR DIPA	KODE PERIODE	NOMOR REVISI	KODE FUNGSI	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	KETERANGAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	NILAI BELANJA	NILAI BELANJA SP2B	NILAI BELANJA KOREKSI	NILAI BELANJA KOREKSI SP2B	NILAI PEMULIHAN PAGU	NILAI BELANJA SP3	PERSEN REALISASI	TGL KIRM DATA	TGL FLAG OMSPAN	KODE TEMATIK	KODE PRIORITAS NASIONAL	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	DESKRIPSI KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	MAJOR PROJECT	PAGU TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12	REVISI TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12
1	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-01	1	10.02	DF	2129	QEN	005	Siswa MI Penerima BOS	Orang	531	0	1	Pembayaran dimulai bulan Februari 2026	473.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-04-22	2026-04-22	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
2	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-01	1	10.90	WA	2135	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	8.33	Pembayaran operasional bulan Januari 2026	269.000.000	3.191.510	3.191.510	0	0	0	0	0	1.19	2026-04-22	2026-04-22	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
3	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-03	2	10.90	WA	2135	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	24.99	Pembayaran operasional bulan Maret 2026	269.000.000	54.857.892	54.857.892	0	0	0	0	0	20.39	2026-04-22	2026-04-22	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
4	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-03	2	10.02	DF	2129	QEN	005	Siswa MI Penerima BOS	Orang	531	100	19	Pembayaran bantuan siswa MI Penerima BOS bulan Februari 2026	473.536.000	88.575.000	88.575.000	0	0	0	0	0	18.71	2026-04-22	2026-04-22	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
5	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-04	3	10.90	WA	2135	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	35.99	Pembayaran operasional bulan April 2026	269.000.000	95.840.609	95.840.609	0	0	0	0	0	35.63	2026-05-06	2026-05-06	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
6	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-05	4	10.90	WA	2135	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	44.96	Pembayaran operasional bulan Mei 2026	269.000.000	120.945.685	120.945.685	0	0	0	0	0	44.96	2026-06-02	2026-06-02	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
7	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-05	4	10.02	DF	2129	QEN	005	Siswa MI Penerima BOS	Orang	531	158	32.76	Bantuan siswa penerima BOS	473.536.000	155.123.000	155.123.000	0	0	0	0	0	32.76	2026-06-02	2026-06-02	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
8	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-02	2	10.90	WA	2135	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	16.66	Pembayaran operasional bulan Februari 2026	269.000.000	27.718.115	27.718.115	0	0	0	0	0	10.3	2026-04-22	2026-04-22	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
9	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-06	4	10.90	WA	2135	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	54.13	Pembayaran operasional bulan Juni 2026	269.000.000	145.615.635	145.615.635	0	0	0	0	0	54.13	2026-07-01	2026-07-01	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
10	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-04	3	10.02	DF	2129	QEN	005	Siswa MI Penerima BOS	Orang	531	116	23.71	Diterimanya bantuan BOS MI	473.536.000	112.275.000	112.275.000	0	0	0	0	0	23.71	2026-05-06	2026-05-06	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
11	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-02	2	10.02	DF	2129	QEN	005	Siswa MI Penerima BOS	Orang	531	0	9	Pembayaran bantuan siswa MI Penerima BOS bulan Januari 2026	473.536.000	31.800.000	31.800.000	0	0	0	0	0	6.72	2026-04-22	2026-04-22	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0
12	2026	025	KEMENTERIAN AGAMA	04	Ditjen Pendidikan Islam	417611	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	DIPA-025.04.2.417611/2026	2026-06	4	10.02	DF	2129	QEN	005	Siswa MI Penerima BOS	Orang	531	185	40.08	Terbayarnya siswa MI penerima BOS	473.536.000	189.773.000	189.773.000	0	0	0	0	0	40.08	2026-07-01	2026-07-01	005-2026	00-2026	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2026	Bukan Program Prioritas	00.00-2026	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	0	0